JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1679-1683
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2699

Efektivitas Pelaksanaan Program Hukum dan Rancangan UU dalam Bidang Hukum dan Perundang-Undangan di DPRD Ponorogo

Aghnia Salma Salsabila, Edi Santoso
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Correspondence email: niasalsabila1204@gmail.com, edisantoso9247@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas pelaksanaan program hukum dan rancangan Undang-Undang yang dilaksanakan oleh sub bagian Hukum dan Perundang-Undangan di DPRD Ponorogo. Hukum perundang-undangan merupakan sebuah hukum tertulis yang dibentuk melalui pejabat yang berwenang maupun pihak yang berwenang dan diwujudkan dalam bentuk tertulis Yang Harus dipatuhi oleh masyarakat. Di dalam hukum dan perundang-undangan terdapat sebuah norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan kehidupan serta perilaku didalam negara. Dalam lembaga pemerintahan, khususnya DPRD memiliki sebuah sub bagian yang bertugas untuk mengelola perundang-undangan dan menjalankan sistem peraturan sesui pedoman di setiap kegiatan dan aktivitas pemerintahan. Bagian hukum dan peraturan perundang-undangan di dalam DPRD memiliki tugas untuk melaksanakan implementasi peraturan perundang-undangan serta meneliti perumusan peraturan perundang-undangan dengan melakukan telaah hukum dan memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan didukung dengan mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum di dalam lembaga pemerintahan.

Kata kunci : Hukum dan Perundang-Undangan, Program Pemerintah Daerah, DPRD

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of legal programs and draft laws carried out by the Law and Legislation sub-section in the Ponorogo DPRD. Legislation is a written law that is formed through authorized officials and authorized parties and is realized in written form that must be obeyed by the community. In law and legislation there is a norm that serves as a guide for the community to carry out life and behavior within the state. In government institutions, especially DPRD has a sub-section which is tasked with managing legislation and implementing a regulatory system according to the guidelines in every government activity and activity. The legal and statutory department in the DPRD has the task of carrying out the implementation of laws and regulations as well as researching the formulation of laws and regulations by conducting legal studies and providing legal assistance to parties in need supported by publishing and documenting legal products within the institution.*

Keywords **:** *Laws and Legislation, Local Government Programs, DPRD*

PENDAHULUAN

Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan ditetapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundangundangan (legislasi). Pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan harus menimbang dari berbagai segi sehingga tidak ada yang lebih diuntungkan dan tidak ada yang lebih dirugikan atau dapat dikatakan adil secara perumusan dan secara pelaksanaannya. Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (Pasal 1 angka 1 UU No. 12 Tahun 2011). Prosedur atau pembentukan peraturan perundang-undangan pada suatu lembaga dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan dapat terjadi kesamaan prosedur pembentukan undang-undang. Pada intinya semua prosedur bertujuan agar kegiatan didalam lembaga tersebut dapat dijalankan sesuai norma dan aturan yang berlaku.

Selain itu pada bagian hukum dan peraturan perundang-undangan juga terdapat sub bagian perancang perundang-undangan yang memiliki fungsi penyiapan bahan rancangan peraturan daerah yang mencakup menyiapkan seluruh komponen dan bahan-bahan yang diperlukan untuk merancang sebuah peraturan daerah dengan berpedoman pada undang-undang sebelumnya atau undang-undang yang lebih tinggi serta Undang-Undang Dasar 1945. Pada lembaga pemerintahan daerah masih sering ditemui bahwa pelaksanaan perundang-undangan belum dijalankan secara maksimal dan masih menuai hambatan dikarenakan prosedur hukum yang dilakukan tidak tepat sasaran dan terkadang tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hal ini dapat dilihat bahwa peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat sehingga menimbulkan dampak yang negatif serta tidak memberikan kemanfaatan dan juga menyelesaikan problema di masyarakat. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan maupun yang disusun oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kebutuhan dan masalah apa yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun implementasinya tidak dapat dilaksanakan secara semena-mena dan tanpa adanya pemikiran maupun pertimbangan secara matang. Fungsi adanya sub bagian di dalam lembaga pemerintahan daerah adalah untuk membantu jalannya pemerintahan yang sesuai dengan kriteria dan kemampuan aparatur sipil negara dan tidak mencampuradukkan antara fungsi organisasi atau sub bagian yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pengelompokan fungsi sub bagian di dalam lembaga pemerintahan maka akan memudahkan ketika akan menjalankan fungsi pemerintahan baik itu itu secara vertikal maupun horizontal dan mengurangi adanya miskomunikasi antar perorangan dan antar organisasi di dalam lembaga pemerintahan.

METODE

Penelitian ini berfokus pada penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode yang didasarkan pada aspek positivisme dan digunakan untuk meneliti sebuah fenomena atau kondisi objek yang berlangsung secara alami dan menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci yang memegang kendali atas sebuah penelitian yang dilakukan. Penelitian deskriptif kualitatif memiliki tujuan untuk menjabarkan dan menganalisis secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dimana objek atau fenomena yang diteliti akan dilakukan analisa secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian yang utama adalah manusia yang menjadi bagian dari sebuah fenomena tertentu dan hasil penelitiannya berupa deskripsi yang disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksana program hukum dan undang-undang pada bagian hukum dan perundang-undangan. Efektivitas pelaksanaan program hukum yang dilakukan oleh sub bagian hukum dan perundang-undangan pada DPDR Ponorogo.

Penelitian ini didapatkan melalui data primer dengan menggunakan teknik purposive sampling serta wawancara mendalam kepada beberapa informan. Pihak yang menjadi sumber data dipilih atas dasar memiliki wawasan informasi yang diperlukan. Informan yang dianggap layak menjadi sumber data adalah seseorang yang menjalankan program hukum dalam bidang terkait dan memahami alur pelaksanaan programnya, namun terdapat informan yang lain sehingga dapat membantu melengkapi data-data yang diperlukan. Data yang diperoleh berdasarkan wawancara kepada informan dan adanya dokumentasi sebagai bentuk dari teknik pengumpulan data triangulasi. Selain itu juga menambahkan sebuah observasi pasif yang digunakan jika data dari wawancara dan dokumentasi dirasa kurang memadai dan belum melengkapi data-data utama. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kategorisasi serta menyimpulkan sebuah sintesis dan yang teraakhir mengembangkan hipotesis kerja.

HASIL

Dalam melaksanakan tugasnya bagian hukum dan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi perumusan atau perancangan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya sub bagian ini mengatur terkait dengan perumusan perundang-undangan dan bagaimana peraturan perundang-undangan itu disesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat serta mampu menjadi penyelesaian masalah yang efektif di masyarakat. Bahan Rancangan peraturan daerah ini nantinya akan diajukan dan mendapatkan dua opsi diterima atau ditolak sehingga kemungkinan apabila peraturan daerah ini diterima maka harus sesuai dengan keadaan lokal masyarakat dan bagaimana pelaksanaan pemerintahan di daerah. Bagian hukum dan peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi penghimpunan peraturan perundang-undangan serta melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum. Tidak hanya terbatas pada perancangan dan perumusan perundang-undangan namun pada bagian ini juga perlu melakukan replikasi dan dokumentasi produk hukum sehingga dapat diketahui masyarakat dan menjadi layanan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Fungsi selanjutnya yaitu pada sub bagian analisis kebijakan yaitu menganalisis implementasi kebijakan dan bantuan hukum terhadap seluruh unsur pemerintah daerah berdasarkan masalah yang muncul dalam pelaksanaan tugas. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya aktivitas pemerintahan terkadang timbul sebuah hambatan dan masalah dalam pelaksanaan tugasnya Oleh karena itu diperlukan sebuah analisis kebijakan dan bahan pertimbangan serta bantuan hukum untuk menyelesaikan kasus hukum dan melancarkan kegiatan pemerintahan.

Fungsi yang terakhir adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terkait dengan tugas dan fungsinya. Dari fungsi yang terakhir ini dapat disimpulkan bahwa bagian hukum dan peraturan perundang-undangan juga memiliki fungsi untuk membantu fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan aktivitas pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Pada bagian hukum dan perundang-undangan masih terbagi atas sub bagian lainnya yaitu sub bagian Perancang perundang-undangan yang memiliki wewenang atau tugas untuk meneliti dan menganalisis perumusan rancangan peraturan perundang-undangan. Jika dijabarkan lebih jauh maka tugas dari sub bagian perancang perundang-undangan adalah melaksanakan dan menjalankan rancangan hukum dan undang-undang yang berkaitan dengan tugas pemerintah daerah. Selain itu juga mengkaji rancangan peraturan dan undang-undang terahulu yang menjadi

pedoman untuk perumusan undang-undang dimasa mendatang. Sub bagian ini juga memiliki tugas untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah serta meneliti dan menganalisis produk hukum.

Pada sub bagian selanjutnya yaitu sub bagian analisis kebijiakan yang memiliki tugas untuk menganalisis implementasi kebijakan yang telah berjalan dalam aktivitas pemerintahan Jika dijabarkan lebih jauh tugas sub bagian analisis kebijakan yaitu meninjau pelaksanaan program pemerintah apakah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menganalisis hambatan maupun kendala dalam pelaksanaannya sekaligus memberikan bantuan dan juga perlindungan hukum kepada komponen pemerintah daerah serta menyelenggarakan penyuluhan berbasis hukum. Pada sub bagian yang terakhir yaitu sub bagian Pustakawan memiliki tugas atau wewenang untuk melakukan dokumentasi serta publikasi produk hukum dan lembaran daerah untuk mengatur penyebaran dokumen hukum. Jika dianalisis lebih jauh sub bagian dokumentasi hukum memiliki tugas untuk mengumpulkan dan mendokumentasikan produk hukum serta menerbitkan lembaran daerah maupun berita daerah dan melakukan publikasi produk hukum secara massal.

Di dalam lembaga pemerintahan banyak sekali surat keluar dan masuk terutama yang ditujukan kepada bidang-bidang tertentu untuk meninjau lebih lanjut pelaksanaan program maupun kerjasama yang dilakukan oleh satu atau dua pihak. Pada bidang hukum dan perundang-undangan dilakukan pengecekan berkas terkait dengan surat masuk dan keluar untuk meminimalisir adanya kesalahan penerimaan surat dan keterlambatan pelaksanaan surat tugas pada bidang hukum dan perundang-undangan. Salah satu surat yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu terkait dengan surat pelaksanaan WFH. Pada masa pandemi yang kasusnya naik turun memang beberapa kali pemerintah menerapkan kebijakan yang berubah-ubah untuk menekan angka kasus covid dan biasanya penerapan WFH ini dilakukan secara merata baik dalam lingkup Desa hingga secara nasional. Surat terkait dengan peraturan atau kebijakan yang baru perlu untuk dikaji dan didiskusikan secara lebih detail agar pelaksanaannya di dalam pemerintahan daerah dapat diterapkan secara efektif dan tidak ada ada pihak-pihak yang menyalahgunakan maupun melanggar kebijakan tersebut.

Struktur jabatan yang ada di DPRD Ponorogo tentu saja berbeda dengan DPRD yang ada di kota-kota lain oleh karena itu perlu untuk menganalisis Bagaimanakah struktur jabatan dan peranan maupun fungsi yang dijalankan oleh tiap-tiap app yang sudah di atur dalam struktur jabatan tersebut. Bidang hukum dan perundang-undangan memang lebih dominan untuk mempersiapkan berkas rapat dikarenakan setiap rapat dan akan adanya pertimbangan terhadap kasus tertentu harus meninjau dan berpedoman pada hukum dan perundang-undangan sehingga pada setiap rapat harus menyiapkan berkas hukum yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Selain mempersiapkan bahan atau berkas rapat bidang hukum dan perundang-undangan juga melakukan sosialisasi baik itu kepada pihak internal maupun eksternal seperti masyarakat maupun lembaga pemerintahan dan lembaga swasta lainnya terkait dengan isu tertentu yang berpedoman pada hukum yang berlaku di masyarakat. Selayaknya bidang dalam lembaga pemerintahan maka setiap komponen perlu melakukan rekap data SPJ perjalanan dinas dikarenakan setiap bagian di dalam lembaga pemerintahan memiliki data perjalanan dinas tersendiri dan tidak akan pernah sama baik itu jenis perjalanan dinasnya maupun lokasi serta waktu perjalanan dinas.

Dengan melakukan rekapitulasi perjalanan dinas maka akan mempermudah untuk meninjau bagaimanakah pelaksanaan perjalanan dinas pada bulan atau tahun sebelumnya dan menjadikan rekapitulasi ini sebagai dasar untuk evaluasi agar perjalanan dinas pada bulan dan tahun selanjutnya dapat lebih baik dan efektif serta sesuai dengan fungsi dan kewenangan bagian hukum dan perundang-undangan. Tidak hanya melakukan rekapitulasi, pada bidang ini juga perlu melakukan pengecekan berkas-berkas SPJ agar tidak ada yang tertukar maupun beberapa berkas yang janggal sehingga apabila nantinya berkas ini akan dibutuhkan maka tidak perlu mencari dan sudah sesuai dengan urutan maupun tatanan yang telah ditetapkan. Perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan yang rutin dilakukan oleh setiap lembaga pemerintahan dikarenakan lembaga pemerintahan ini akan terus melakukan kerjasama kepada pihak-pihak lain dan beberapa kali melakukan perjalanan dinas untuk kegiatan sosialisasi maupun hubungan kerjasama dan sebelum melakukan perjalanan dinas perlu menyiapkan File atau berkas yang akan dibutuhkan selama kegiatan perjalanan dinas ini berlangsung.

Di dalam lembaga pemerintahan banyak sekali surat keluar dan masuk terutama yang ditujukan kepada bidang-bidang tertentu untuk meninjau lebih lanjut pelaksanaan program maupun kerjasama yang dilakukan oleh satu atau dua pihak. Pada bidang hukum dan perundang-undangan dilakukan pengecekan berkas terkait dengan surat masuk dan keluar untuk meminimalisir adanya kesalahan penerimaan surat dan keterlambatan pelaksanaan surat tugas pada bidang hukum dan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya suatu kegiatan di dalam pemerintahan tentu tidak terlepas dari adanya hambatan maupun kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan dan kendala yang dianalisis pada penelitian ini terfokus pada bagian hukum dan perundang-undangan serta bagaimana implementasi tugas dan fungsi bagian hukum dan perundang-undangan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan daerah. Hambatan

atau kendala yang ditemui adalah beberapa pegawai yang termasuk kedalam bagian hukum dan perundang-undangan terkadang tidak melakukan pengelompokan surat berdasarkan tujuan maupun fungsi suratnya sehingga beberapa kali terlihat ada surat yang belum dibaca namun hanya diletakkan begitu saja dan dikawatirkan akan hilang sebelum sempat dibaca.

Bagian hukum dan perundang-undangan juga alat dalam membangun kerjasama serta menelaah kasus maupun isu-isu tertentu baik itu rapat terkait dengan ACS 2022 sekaligus terkait dengan pansus yang membahas RAPERDA. Raperda merupakan Rancangan peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan serta dibentuk oleh DPRD provinsi atau daerah dengan persetujuan bersama dengan gubernur. Rancangan peraturan daerah ini biasanya dibahas apabila akan ada peninjauan terhadap undang-undang daerah tertentu maupun pembentukan undang-undang daerah yang baru. Selain itu dalam bidang ini juga melakukan persiapan berkas terkait dengan BUMDES atau yang biasa disebut dengan badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa merupakan salah satu badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama dengan desa-desa yang lain untuk mengelola usaha maupun memanfaatkan aset serta mengembangkan investasi dan produktivitas masyarakat lokal dalam hal menyediakan jasa pelayanan maupun jasa usaha untuk kesejahteraan masyarakat di desa.

Selain itu hambatan maupun kendala yang dialami adalah terkait dengan Rancangan peraturan daerah yang beberapa kali perlu dipertimbangkan dan memakan waktu yang sangat lama terlebih lagi Jika beberapa anggota tidak dapat hadir rapat maupun telat menghadiri rapat sehingga akan memperlambat proses perancangan undang-undang. Padatnya jadwal dan tingginya jam terbang seharusnya bisa menyeimbangkan antara kualitas sistem pemerintahan yang ada dengan program yang sedang berjalan sehingga apabila sistem pemerintahan telah diterapkan secara sistematis dan memiliki prosedur yang tetap maka dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi hambatan maupun kendala. Apabila sebelumnya telah ditemukan hambatan maupun kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya maka harus dipikirkan dan dianalisis alternatif penyelesaian yang sesuai dengan problema yang terjadi di bagian hukum dan perundang-undangan. Merujuk pada fungsi dan tugas di bidang hukum dan perundang-undangan maka banyak sekali tugas atau fungsi yang sangat kompleks dan harus dikerjakan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan fatal terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di DPRD Ponorogo. Alternatif penyelesaian masalah terkait dengan tidak kondusif nya surat keluar masuk sehingga mengakibatkan adanya beberapa surat yang terjadi yaitu dengan memberikan wadah khusus untuk surat yang dibagi atas kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kepentingan yang disesuaikan dengan kebutuhan di bidang hukum dan perundang-undangan sehingga apabila ingin mencari surat maupun surat tugas akan lebih efektif dan tidak memakan waktu lebih lama. Pelaksanaan hukum dan perundang-undangan dalam DPRD Ponorogo dinilai telah cukup efektif dan sesuai dengan pedoman hukum yang berlaku sehingga kedepannya dapat dimaksimalkan lagi dalam upaya penekanan hambatan dan kendalanya.

SIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (DPRD Kab. Ponorogo) adalah sebuah lembaga legislative unicameral yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu, oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan ditetapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundangundangan (legislasi). Dalam lembaga pemerintahan, khususnya DPRD memiliki sebuah sub bagian yang bertugas untuk mengelola perundang-undangan dan menjalankan sistem peraturan sesui pedoman di setiap kegiatan dan aktivitas pemerintahan. Bagian hukum dan peraturan perundang-undangan di dalam DPRD memiliki tugas untuk melaksanakan implementasi peraturan perundang-undangan serta meneliti perumusan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan perumusan peraturan perundang-undangan harus menimbang dari berbagai segi sehingga tidak ada yang lebih diuntungkan dan tidak ada yang lebih dirugikan atau dapat dikatakan adil secara perumusan dan secara pelaksanaannya. Selain mempersiapkan bahan atau berkas rapat bidang hukum dan perundang-undangan juga melakukan sosialisasi baik itu kepada pihak internal maupun eksternal seperti masyarakat maupun lembaga pemerintahan dan lembaga swasta lainnya terkait dengan isu tertentu yang berpedoman pada hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam pelaksanaannya suatu kegiatan di dalam pemerintahan tentu tidak terlepas dari adanya hambatan maupun kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Hambatan dan kendala yang dianalisis pada penelitian ini terfokus pada bagian hukum dan perundang-undangan serta bagaimana implementasi tugas dan fungsi bagian hukum dan perundang-undangan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan daerah. Namun sebagaimana mestinya bahwa setiap permasalahan perlu untuk dicari penyelesaian masalahnya agar masalah tersebut tidak menjadi masalah yang besar dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agnes Fitryantica, 2019, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law, *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3)

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI-Press, Jakarta

Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing*, Yogyakara

Hamis S Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Moh. Mahmud MD, 1979, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta,

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum, Masyarakat dan Pembangua*n, Bandung, Alumni

Nuvazria Achir, 2020, Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi, *Jambura Law Review*, 2(1)